



Anggota Dewan Diminta Segera Kembalikan Mobil Dinas

Gianyar (Bali Post) -

Proses pengembalian mobil dinas anggota DPRD Gianyar masih berlangsung. Dari 37 mobil dinas, baru 22 yang sudah dikembalikan. Sisanya, masih dibawa oleh anggota Dewan. Kondisi ini pun mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Gianyar Made Togog. Ia mengimbau anggota DPRD yang belum, untuk segera mengembalikan mobil dinas.

"Kami di pimpinan dewan hanya mengimbau saja. Tolong ini (mobil dinas-red) segera dikembalikan," ucapnya saat ditemui, Senin (11/9) kemarin.

Dikatakannya, secara teknis, terkait pengembalian mobil menjadi kewenangan Sekretaris DPRD untuk diteruskan ke bagian aset Pemkab Gianyar. "Saya

harap dewan yang belum, agar secepatnya mengembalikan mobil itu," katanya.

Diterangkannya, sesuai kebijakan yang telah diketok palu dalam APBD Perubahan 2017, mobil dinas dewan yang ditarik selanjutnya diganti dengan tunjangan transportasi, yang jumlahnya mencapai Rp 12 juta per bulan. "Tapi jumlah persisnya

saya belum tahu, karena menentukan itu harus ada Perbup (Peraturan Bupati-red)," ucapnya.

Untuk diketahui, dari 40 anggota dewan, pengembalian mobil hanya berlaku bagi 37 dewan. Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD tetap memperoleh fasilitas mobil dinas. "Itu (tunjangan transportasi-red) nanti kewenangan masing-masing dewan. Entah dewan akan membeli, menyewa. Yang jelas, transportasi ke kantor menggunakan tunjangan itu," jelas Togog.

Selain tunjangan transportasi, dewan juga mendapat tunjangan perumahan. Na-

mun, belum masuk Perbup. Dikatakannya, untuk tunjangan perumahan ini, menggunakan appraisal daerah wisata Ubud. Jadi, harga sewa rumah di Ubud menjadi patokan tunjangan dewan. "Dikombinasikan juga dengan daerah Gianyar," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Gianyar Wayan Ardana mengatakan, bila sudah dikembalikan, puluhan mobil pelat merah tersebut akan didistribusikan ke sejumlah SKPD yang membutuhkan kendaraan dinas untuk operasional. "Misalnya, beberapa dinas

baru, itu belum ada mobil dan banyak dinas lain yang juga kekurangan kendaraan operasional termasuk Dinas Koperasi dalam pengawasan koperasi ke lapangan mereka juga membutuhkan mobil, tetapi belum punya," ungkapnya.

Batas waktu penyerahan adalah bulan ini. Disinggung terkait puluhan sopir yang sebelumnya mengawal kendaraan tersebut, Ardana memastikan penyaluran sopir akan diikuti dengan penyaluran mobil dinas. "Semestinya ini mengikuti, karena setiap mobil itu pasti akan membutuhkan sopir," ucapnya. (kmb35)

Edisi : Selasa, 12 September 2017

Hal : 9